

Determinants Of Village Development In The Of Village Funt Allocations

Riska Pratiwi¹, Supami Wahyu Setyowati², Doni Wirshandono Yogivaria³

^{1,2,3} Universitas PGRI Kajuruhan, Malang

Corresponding Author

Nama Penulis: Supami Wahyu Setyowati

E-mail: setyo@unikama.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan politik desa berpengaruh terhadap pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan politik desa. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan di desa-desa di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh sebagai metode pengambilan sampel dan diperoleh sampel sebanyak 50 responden. Teknik analisis data ini menggunakan teknik PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan, tanggung jawab dan rasa kebersamaan berpengaruh secara langsung, hanya saja politik desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Kata Kunci - Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pembangunan Desa

Abstract

The purpose of this research is to find out whether transparency, accountability, community participations and village politics affect village development in managing village funds. The independent variables in this study are transparency, accountability, community participations and village politics. The dependent variable is here. Research is village development. This research was conducted in the villages of the wonotirto sub-district, Blitar district. In this study used saturated sampling as a sampling method and obtained a sample of 50 respondents. This data analysis technique uses the PLS (Partial Least Square) technique. The results of the study show that openness, responsibility and a sense of togetherness have a direct effect, it's just that village politics have no effect on village development.

Keywords - Transparency, accountability, Community Participations, village policy, village fund Allocation (ADD) and village Development

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan UU Desa No. 6 Tahun 2014 (Bender, 2016) bertujuan untuk mendorong perluasan kesejahteraan, mempercepat proses pembangunan dan memperkuat desa di daerah tertinggal. Mengingat rata-rata pembangunan desa di Indonesia masih belum merata. Dalam pembangunannya, desa tidak dapat dipisahkan dari unsur dan kelompok masyarakat yang tinggal didalamnya. Dari pemerintah dan warga desa. Faktor personel merupakan aset terpenting dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan desa (PERPRES, 2018). Dengan berbagai sumber daya desa, mereka memiliki kesempatan untuk secara mandiri mengarahkan pembangunan dan pengelolaannya. Dalam PP No. Ayat 11 pasal 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa pembagian dana desa dari pemerintah kota atau pemerintah daerah kepada desa merupakan dana yang diagi dari bagian dana perimbangan perekonomian negara dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (F. G. R. Dewi & Sapari, 2020).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan desa. Faktor yang pertama adalah transparansi. Menurut dwiyanto (Suprpto & Ayuba, 2021), transparansi adalah penyedia informasi administrasi publik dan menjamin kemudahan akses informasi yang bener dan memadai/ faktor lain yang mempengaruhi pembangunan desa adalah akuntabilitas (tanggung jawab). Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditentukan. Faktor ketiga yang mempengaruhi pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan masyarakat dianggap tidak hanya sebagai bagian dari proses tetapi juga sebagai bagian dari tujuan, karena partisipasi merupakan salah satu indikator keberhasilan terutama dalam pembangunan desa (Yikwa et al., 2020). Faktor keempat yang mempengaruhi pembangunan desa adalah politik desa, atau kebijakan pemerintah desa, yang merupakan produk hukum, karena kekuasaan ini dipegang secara sah oleh masing-masing pemerintah desa, meskipun kecil dan bersifat lokal dan termasuk wilayah administrasi desa itu sendiri (intan sengaji & Nur Fadrih Asyik, 2018).

Kebijakan penyaluran dana desa (ADD) sendiri didasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 (UU/32/2004), yang kemudian disahkan dengan keputusan pemerintah No. 72 Tahun 2005 (PP 72/2005), yang mengatur tentang kepastian hukum perimbangan keuangan kota dan kabupaten/kota. Dari pemaparan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan kekurangan dari penelitian yang dilakukan dalam karya ini, dapat dijelaskan bahwa pembangunan desa memerlukan pengelolaan dana desa, desa yang baik dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyaakat dan kebijakan desa, karena itu belum terjadi. Sebelumnya, ada kejelasan anggaran untuk pembangunan, administrasi, dan pengelolaan sosial. Permasalahan seluruh desa di Kabupaten Blitar Kecamatan Wonotirto adalah desa di Desa Negni Kecamatan Wonotirto belum ada jalan yang dibangun untuk masyarakat desa kalidau. Selain Desa Ngeni, masih banyak desa lain yang jalanya rusak dan tiak diperhatikan oleh aparat pemerintah. Harjito mengatakan, warga sekitar lebih memilih gotong royong dalam pembangunan jalan dari pada protes dengan menanam pohon pisang di jalan karena jika protes satu orang saja, jalan tidak akan lancar, kata harjito dalam pernyataan misinya. Sebagai komisi, "pengembangan diri ini didukung penuh oleh desa dan warga, mereka lebih memilih gotong royong dari pada protes, menanam pisang dijalan sebagai bentuk protes yang mereka sampaikan (eWarta.co) (<https://ewarta.co/tak-touch-pembangunan-warga-kalidau-bangun-jalan-bersamaswadaya>).

Kajian ini mengkaji dampak transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kebijakan desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti meresikan penelitian ini menjadi sebuah penelitian dengan judul: Determinan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus desa di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar). Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan berguna untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan taraf hidup masyarakat desa untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan pedesaan memegang peran yang sangat penting dalam proyek pembangunan nasional. Dengan membangun desa ini ingin mencapai tujuannya yaitu membangun dan mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri dan maju. Pembangunan desa memiliki spektrum yang sangat luas karena merupakan basis pembangunan. Pembangunan desa merupakan salah satu implementasi desa terkait UU No. 6 tahun 2014 (Bender, 2016), yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan dengan sarana dan prasarana.

Dalam buku indeks pembangunan desa (Barokah H., 2015), pembangunan desa adalah konsep pembangunan pedesaan (rural). Mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Konsep pembangunan desa juga dijelaskan dalam UU Desa Mo. 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, kebutuhan dan pembangunan meningkatkan sarana dan prasarana desa.

Berdasarkan konsep pembangunan desa yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan proses usaha yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perubahan ke arah yang lebih baik. Baik itu kualitas hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat selain sarana dan prasarana desa. Pencapaian proses pembangunan juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat agar pembangunan yang diharapkan dapat mencapai tujuannya.

Transparansi

Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi (partisipasi masyarakat) dan kebijakan desa. Lalu seperti apa transparansi, akuntabilitas partisipasi masyarakat dan kebijakan desa? Pertama transparansi. Menurut (Mardiasmo, 2018), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan. Yaitu publik, menurut dwiyanto (Suprpto & Ayuba, 2021) dikutip, transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi publik tentang pemerintah dan kemudahan memperoleh informasi yang akurat, terpercaya dan memadai.

Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas adalah kewajiban untuk melaporkan dan melaporkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi untuk mencapai hasil yang ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara berkala. Sementara itu, akuntabilitas (Abdul Halim, 2014) adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk menuntut informasi atau pertanggungjawaban atau menjelaskan tindakan dan kegiatan pengurusan seseorang/badan hukum atau organisasi.

Partisipasi Masyarakat

Keikutsertaan asosiasi dalam UU No. 23/2014 pemerintah desa adalah kegiatan warga masyarakat dalam mengarahkan keinginan, gagasan dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Partisipasi adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. 6/2014 (Bender, 2016). Partisipasi masyarakat dikatakan sebagai perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.

Kebijakan Desa

Kebijakan desa merupakan produk hukum karena setiap pemerintah memiliki yurisdiksi, sekecil apapun itu untuk mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Kebijakan desa ini tertuang dalam peraturan desa. Peraturan desa merupakan salah satu bentuk pengawasan dan penguatan peraturan yang lebih ketat karena desa asih berada dibawah dan di bawah kendali pemerintah

kabupaten/kota (Intan Sengaji & Nur Fadrih Asyik, 2018). Meskipun demikian, desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

Hipotesis Penelitian

- H₁ : Transparansi berpengaruh pada pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa.
 H₂ : Akuntabilitas berpengaruh pada pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa.
 H₃ : Partisipasi masyarakat berpengaruh pada pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa.
 H₄ : Kebijakan Desa tidak Berpengaruh pada pengelolaan ADD terhadap Pembangunan Desa.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dimana data utamanya berupa angka-angka yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden. Hasil akhir dari penelitian ini adalah model-model yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Populasi penelitian ini adalah perangkat kelurahan dan perangkat desa di Kecamatan Wonotirto, setiap desa dijadikan responden sebanyak 10 orang, sehingga diperoleh total 80 responden dari 8 desa, namun hanya 50 responden yang dikembangkan dan dapat diuji. Variabel dependen disebut juga variabel terikat.

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan adanya variabel independen (Sugiyono, 2018). Variabel terikat penelitian ini adalah pembangunan desa yang diukur dengan kuesioner berdasarkan karakteristik pembangunan desa. Variabel dependen juga dikenal sebagai variabel yang berpengaruh. Variabel independen juga dikenal sebagai variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel dependen (terkait) (Sugiyono, 2018). Variabel penelitian ini pertama Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Desa.

Analisis data menggunakan model eksternal dan model internal. Model eksternal digunakan agar pengukuran yang digunakan dapat digunakan sebagai metrik dalam analisis model eksternal. Dari indikator validitas konvergen terlihat bahwa ukuran reflektif individu disebut tinggi jika >0,7 berkorelasi dengan konstruk yang diukur. Kedua, validitas diskriminan model pengukuran dinilai secara reflektif menggunakan *cross-loading*. Saat ini, ada metode lain untuk menilai validitas diskriminan, yaitu dengan membandingkan nilai *square root of variance extract* (AVE). Keandalan komposit adalah ukuran konstruk yang dapat dilihat dari koefisien variabel yang mendasarinya. Jika nilai terukur >0,70 maka dapat dikatakan keadaan struktur tinggi. Uji alfa *cronbach* adalah uji reliabilitas yang dilakukan untuk meningkatkan hasil reliabilitas komposit. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's alpha-nya >0,7. Analisis model internal dapat dinilai dengan menggunakan R-square dari konstruk dependen, signifikansi prediktif dari uji Stone-Geisser Q-kuadrat, dan signifikansi koefisien parameter uji-t dan jalur struktural

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Model pengukuran (Outer Model) Validity

Tabel 1.

Construct Validity and Realibility	
	Average Variance Extra (AVE)
X1. Transaparansi	0,615
X2. Akuntabilitas	0,731
X.3 Partisipasi Masyarakat	0,694
X4. Kebijakan Desa	0,644
Y. Pembangunan Desa	0,727

Sumber: hasil olah data Smart PLS 3.0

Nilai AVE tiap variabel bangunan Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Desa untuk lima bangunan dari tabel diatas sudah >0,50. Artinya, kelima pembangunan tergolong valid (Los, n.d.).

Model pengukuran (Outer Model) Reliability

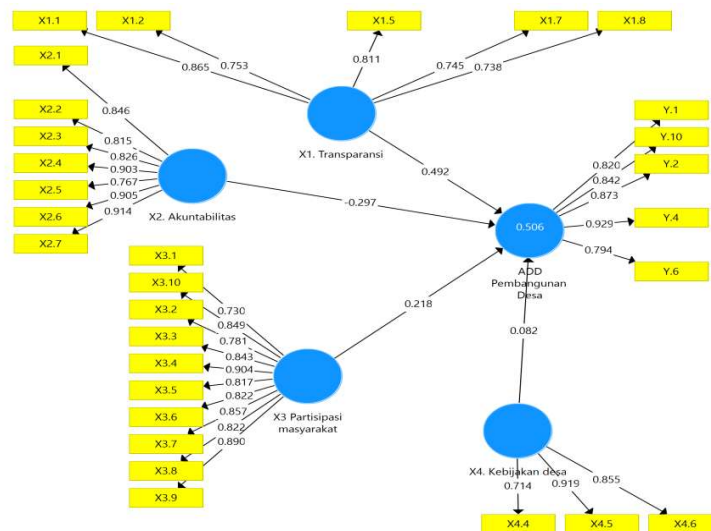
Tabel 2.

Path Coefficients

	Cronbach's Alpha	Realibilitas Komposit
X1. Transparansi	0,848	0,888
X2. Akuntabilitas	0,938	0,950
X3. Partisipasi Masyarakat	0,952	0,958
X4. Kebijakan Desa	0,846	0,877
Y. Pembangunan Desa	0,906	0,930

Berdasarkan hasil perhitungan Cronbach's Alpha dan realibilitas komposit untuk variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kebijakan desa, dan pembangunan desa secara keseluruhan, nilai Composite reliability dan Cronbach's Alpha semuanya berada diatas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kebijakan desa, dan pembangunan desa secara keseluruhan memiliki tingkat realibilitas yang baik atau dapat dikategorikan sebagai reliabel (Los, n.d.).

Model Struktural



Gambar 1.

Hasil Analisis PLS 3.0

Tabel 3.

R-Square

	R-Square	Adjusted R-Square
Y Pembangunan Desa	0,503	0,458

Berdasarkan tabel analisis diatas dengan metode *bootstrapping* diperoleh nilai *R-square* 503>0,5 tergolong moderat serta variabel. Nilai *Adjusted R-square* menunjukkan model penelitian ini memiliki kestabilan yang baik, sehingga dapat dikategorikan sebagai model yang robust. Dengan demikian, model penelitian ini didukung oleh kondisi empiris yang kuat, yang mengatakan bahwa model tersebut valid dan reliabel.

Tabel 4.

Indirect Effect

			Sampel Asli (O)	T Statistik (O/STEDEV)	P-Values
X1	Transparansi	->Y	0,492	2,877	0,044
	Pembangunan Desa				
X2	Akuntabilitas	-> Y	-0,297	2,858	0,044
	Pembangunan Desa				
X3	Partisipasi Masyarakat	-> Y	0,218	2,089	0,037
	pembangunan Desa				
X4	Kebijakan Desa	-> Y	0,082	0,398	0,691
	Pembangunan Desa				

Berdasarkan Ouput tersebut dapat disimpulka bahwa hasil untuk uji hipotesisnya sebagai berikut:

1. Hasil hipotesis pertama pengaru Transparansi positif serta signifikan dilihat dari koefisien parameter senilai 0,492. Nilai signifikan, yaitu $0,004 < 5\%$ tingkat *alpha*, *T-statistic* $2,877 > 1,65$ (T-tabel).
2. Hasil hipotesis kedua pengaruh Akuntabilitas negatif serta signifikan dilihat dari koefisien parameter senilai -0,297. Nilai signifikan, yaitu $0,004 < 5\%$ tingkat *alpha*. Hal ini juga dibuktikan nilai *T-statistic* sebesar $2,890 > 1,65$ (T-tabel).
3. Hasil hipotesis ketiga partisipasi masyarakat positif serta signifikan dilihat dari koefisien parameter senilai 0,218. Nilai signifikan, yaitu $0,037 < 5\%$ tingkat *alpha* hal ini juga dibuktikan nilai *T-statistic* sebesar $2,890 > 1,65$ (T-tabel).
4. Hasil Hipotesis keempat kebijakan desa berpengaruh negatif serta tidak signifikan ditunjukan koefisien parameter sebesar 0,082. Nilai signifikan, yaitu $0,692 > 5\%$ hal ini juga dibuktikan nilai *T-statistic* sebesar $0,398 < 1,65$.

B. Pembahasan Hasil

Pengaruh Transparansi Pada Pengelolaan ADD Terhadap Pembangunan Desa

Setelah dilakukanya analisis data, diperoleh hasil penelitian pertama menunjukan bahwa variabel transparansi berpengaruh pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa se-kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Dengan demikian hipotesisnya yang menyatakan bahwa hasil tersebut dapat disimpulkan transparansi atau keterbukaanya dalam pembangunan desa sudah berkembang dengan baik, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi dengan baik tentang penyelenggaraan kinerja pemerintah desa. Semakin transpaan atau terbukanya pemerintah desa tentang pembangunan desa terhadap masyarakat desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat.

Penelitian ini serupa dengan (Jaa et al., 2020), (Maju, 2020) dan (Putra & Rasmini, 2019) yang mengatakan bahwa transparansi berpengaruh pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.

Pengaruh Akuntabilitas Pada Pengelolaan ADD Terhadap Pembangunan Desa

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa se-kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Tetapi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mendapatkan hasil dari sampel original akuntabilitas mendapatkan hasil yang negatif pada pengelolaan alokasi dana desa. Dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan alokasi dana desa untuk pembangunan desa harus ada pertanggung jawaban dan pengelolaan dalam melaporkan sendiri kegiatan keuangan alokasi dana desa tersebut.

Penelitian ini sejalan atau didukung oleh (D. E. Dewi & Adi, 2019) dan (Suyono, 2022) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. Berbeda dengan hasil penelitian (Intan Sengaji & Nur Fadrijh Asyik, 2018) yang mengatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan ADD terhadap Pembangunan Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa berdampak positif terhadap pembangunan desa se-kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa diterima. Jadi dalam hal ini dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat semakin meningkat pembangunan desa juga akan semakin meningkat, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa masyarakat terlibat dalam pembangunan desa untuk mengarahkan pemikiran, gagasan dan aspirasinya kedalam pelaksanaan pembangunan desa ikut serta dalam pembangunan desa. Semakin banyak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah desa dengan menyediakan dana desa untuk pembangunan desa, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa.

Penelitian ini sejalan atau didukung oleh (Situmorang et al., 2020) dan (TAMBAK, 2021) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. Lain halnya dengan penelitian oleh (Yikwa et al., 2020) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.

Pengaruh Kebijakan Desa Pada Pengelolaan ADD Terhadap Pembangunan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa di desa se-kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah desa pada pengelolaan alokasi dana desa dalam sampel asli itu berpengaruh positif dan signifikan tetapi dalam perhitungan *P-values* lebih dari lima persen yang artinya tidak berpengaruh pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.

Penelitian ini sejalan atau didukung oleh penelitian dari (Novitasari., dan Asyik, 2019) yang menyatakan bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Sehingga meningkatnya kebijakan desa tidak diikuti dengan peningkatan pada alokasi dana desa terhadap pembangunan desa, begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Yupita & Juita, 2020) yang menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kebijakan desa pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. Hasil dari analisis Smart PLS 3.0 yang dibuat peneliti dengan hipotesis yang sudah dijelaskan diatas adalah Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. Sedangkan kebijakan desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan hasil tersebut, saran penelitian ini di antaranya :

1. Bagi instansi pemerintah desa memberikan masukan bagi instansi pemerintah supaya kebijakan desa lebih diperhatikan lagi dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa yang lebih baik lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka wawasan yang lebih luas baik secara teoritis maupun praktis, dan semoga penelitian ini dapat diuji kembali dalam pengelolaan alokasi dana desa yang ditunjukkan untuk pembangunan desa dengan variabel kebijakan desa yang lebih mendalam, dalam sampel yang lebih besar lagi untuk hasil yang lebih baik, maksimal dan memuaskan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Barokah H., D. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014, Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bapenas.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), 287–299. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Intan Sengaji & Nur Fadrih Asyik. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237>
- Maju, S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3–15.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. CV. Andi Offest.
- Novitasari., dan Asyik, N. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–16.
- PERPRES. (2018). Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Lex Crimen*, 6(10), 1–11.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (M. P. Setiawami, S.H. (ed.); cetakan ke). ALFABETA, cv. Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung.
- Suprpto, S., & Ayuba, M. (2021). Transparansi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Mahyani Di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 3(2), 51. <https://doi.org/10.31314/jsap.3.2.51-58.2020>
- Suyono, D. W. F. (2022). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Bandung Tulungagung. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 2(1), 58–78. <https://doi.org/10.19105/sfj.v2i1.5671>
- TAMBAK, D. G. P. (2021). Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Beringin, Kecamatan Sibisa,

- Kabupaten Dairi). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 5(4), 83–90. <https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/IJK/article/download/313/315>
- Yikwa, K., Naukoko, A. T., & Steeva Y. L Tumangkeng. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pededasaan (Study kasus: 5 Desa Distrik *Jurnal Berkala Ilmiah ...*, 20(02), 116–129. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30231%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/30231/29227>
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 56. <https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.176>